



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

JL. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – Bypass Cempaka Putih Timur – Jakarta Pusat
Fax. (021) 26273535, Website: badilum.mahkamahagung.go.id, PO.BOX 1148 Jkt

Nomor : 1368/DJU/OT1.6/V/2024 Jakarta, 30 Mei 2024
Lampiran : 1 berkas
Hal : Melengkapi Hasil Tindak Lanjut
Pengawasan APIP

Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi
Di
Tempat

Sehubungan adanya penambahan Pengadilan Negeri yang akan dilakukan evaluasi untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Internal Badan Pengawasan MA RI, kepada Pengadilan Negeri yang telah diusulkan agar dapat melengkapi informasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP/BPK Tahun 2024 melalui tautan https://bit.ly/Penyelesaian_TLHP_MA2024, sebagaimana dimaksud huruf C Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023. Adapun kelengkapan informasi tersebut meliputi:

1. Rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKASN yang disampaikan oleh pimpinan unit/satuan kerja kepada Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (contoh surat sebagaimana lampiran 3);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari masing-masing pimpinan unit/satuan kerja yang menyatakan bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang ada (contoh surat sebagai lampiran 4);

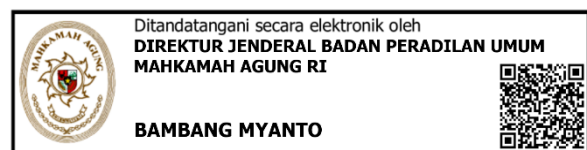


- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. Ikhtisar pembangunan ZI unit/satuan kerja yang memuat informasi tentang upaya yang telah dilakukan, dengan ketentuan:
 - a. Maksimal 3 (tiga) halaman untuk setiap unit kerja; dan
 - b. Font 11, Times New Roman, spasi 1,15 (format ikhtisar sebagaimana lampiran 5,6).
4. Matriks atau tabel pemetaan risiko unit/satuan kerja (contoh sebagaimana lampiran 7).

Data tersebut dilengkapi **paling lambat tanggal 31 Mei 2024**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



DAFTAR PENGUSULAN WBK TAHUN 2024

- PENGADILAN TINGGI

NO	PENGADILAN TINGGI	NILAI SPAK	NILAI SPKP	JUMLAH RESPONDEN SPAK	JUMLAH RESPONDEN SPKP	PENILAIAN MANDIRI	HASIL EVALUASI
1.	Padang	3,97	3,97	31	36	95,72	78,73
2.	Palembang	3,94	3,99	52	64	97,26	86,83
3.	Banten	3,61	3,80	55	41	93,61	87,46
4.	Kupang	3,94	4,00	54	51	90,70	79,17
5.	Samarinda	4,00	4,00	71	70	97,70	94,36
6.	Manado	4,00	3,95	31	48	95,17	92,97
7.	Jayapura	3,93	3,86	55	53	96,19	91,81
8.	Gorontalo	3,83	3,83	43	63	95,52	77,50

- PENGADILAN NEGERI

NO	PENGADILAN NEGERI	JUMLAH RESPONDEN SPAK	JUMLAH RESPONDEN SPKP	PENILAIAN MANDIRI	HASIL EVALUASI PT
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	71	65	98,56	90,96
2.	Pengadilan Negeri Bukittinggi	32	30	98,64	97,20
3.	Pengadilan Negeri Padang Panjang	34	31	93,28	92,17
4.	Pengadilan Negeri Padang	30	30	97,07	92,53
5.	Pengadilan Negeri Batusangkar	54	53	98,64	97,20
6.	Pengadilan Negeri Sekayu	49	51	98,16	97,45
7.	Pengadilan Negeri Pagar Alam	53	49	99,43	93,26
8.	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	71	74	98,68	85,74
9.	Pengadilan Negeri Palembang	298	303	98,18	94,47
10.	Pengadilan Negeri Lahat	113	116	99,8	94,6
11.	Pengadilan Negeri Prabumulih	138	131	100	94,27
12.	Pengadilan Negeri Kayuagung	32	33	99,84	92,96
13.	Pengadilan Negeri Baturaja	260	257	98,44	95,35
14.	Pengadilan Negeri Cilacap	95	96	92,68	83,27
15.	Pengadilan Negeri Pati	45	42	98,57	88,61



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

NO	PENGADILAN NEGERI	JUMLAH RESPONDEN SPAK	JUMLAH RESPONDEN SPKP	PENILAIAN MANDIRI	HASIL EVALUASI PT
16.	Pengadilan Negeri Tegal	117	120	97,43	88,78
17.	Pengadilan Negeri Purwokerto	38	37	92,01	83,39
18.	Pengadilan Negeri Kudus	31	31	97,96	75,56
19.	Pengadilan Negeri Pekalongan	34	35	90,57	77,73
20.	Pengadilan Negeri Wonosobo	80	81	96,44	89,35
21.	Pengadilan Negeri Boyolali	61	61	97,08	83,82
22.	Pengadilan Negeri Wonogiri	40	41	96,1	80,84
23.	Pengadilan Negeri Blora	90	94	96,84	89,52
24.	Pengadilan Negeri Purbalingga	38	35	99,25	81,38
25.	Pengadilan Negeri Demak	31	31	92,21	82,57
26.	Pengadilan Negeri Kisaran	32	31	98,42%	91,29%
27.	Pengadilan Negeri Sibolga	44	61	96,20	88,97
28.	Pengadilan Negeri Stabat	63	66	99,39	92,22
29.	Pengadilan Negeri Kupang	34	35	98,34	96,72
30.	Pengadilan Negeri Atambua	36	34	98,59	78,58
31.	Pengadilan Negeri Waikabubak	30	30	99,34	92,47
32.	Pengadilan Negeri Maumere	51	56	96,71	93,34
33.	Pengadilan Negeri Lembata	40	40	96,61	88,91
34.	Pengadilan Negeri Ende	48	53	97,52	92,79
35.	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	32	32	99,92	84,32
36.	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	34	34	96,13	88,11
37.	Pengadilan Negeri Muara Teweh	45	46	99,22	83,68
38.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	103	103	90,98	80,61
39.	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	148	144	92,28	80,79

NO	PENGADILAN NEGERI	JUMLAH RESPONDEN SPAK	JUMLAH RESPONDEN SPKP	PENILAIAN MANDIRI	HASIL EVALUASI PT
40.	Pengadilan Negeri Palangkaraya	36	35	100	85,23
41.	Pengadilan Negeri Kasongan	39	36	95,76	89,47
42.	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	30	30	97,2	83,19
43.	Pengadilan Negeri Bireuen	30	30	97,18	89,21
44.	Pengadilan Negeri Lhoksukon	57	231	99,6	87,65
45.	Pengadilan Negeri Suka Makmue	102	101	98,75	82,87
46.	Pengadilan Negeri Mentok	32	39	94,46	92,48
47.	Pengadilan Negeri Koba	35	47	94,59	85,05
48.	Pengadilan Negeri Sintang	52	83	99,63	94,04
49.	Pengadilan Negeri Ngabang	42	42	99,08	86,76
50.	Pengadilan Negeri Mempawah	100	100	96,93	87,7
51.	Pengadilan Negeri Sanggau	31	32	94,67	94,7
52.	Pengadilan Negeri Ketapang	40	40	98,85	91,95
53.	Pengadilan Negeri Putussibau	30	30	96,82	94,59
54.	Pengadilan Negeri Limboto	31	31	92,45	94,99
55.	Pengadilan Negeri Tilamuta	59	60	97,47	96,62
56.	Pengadilan Negeri Marisa	120	126	93,53	82,82
57.	Pengadilan Negeri Penajam	39	39	98,65	98,7
58.	Pengadilan Negeri Tarakan	71	70	92,92	77,93
59.	Pengadilan Negeri Ambon	45	48	95,46	90,18
60.	Pengadilan Negeri Masohi	43	44	91,74	90,33
61.	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	125	127	97,9	89,13
62.	Pengadilan Negeri Poso	67	77	96,08	92,61
63.	Pengadilan Negeri Bau Bau	116	109	96,77	99,76

NO	PENGADILAN NEGERI	JUMLAH RESPONDEN SPAK	JUMLAH RESPONDEN SPKP	PENILAIAN MANDIRI	HASIL EVALUASI PT
64.	Pengadilan Negeri Pasarwajo	50	50	98,97	96,26
65.	Pengadilan Negeri Cianjur	115	115	99,35	82,63
66.	Pengadilan Negeri Majalengka	30	30	96,38	89,78
67.	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	31	33	96,73	89,08
68.	Pengadilan Negeri Metro	30	31	98,76	98,56
69.	Pengadilan Negeri Kotabumi	71	74	96,97	84,74
70.	Pengadilan Negeri Liwa	32	34	98,42	94,21
71.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	59	62	99	91,51
72.	Pengadilan Negeri Kota Agung	45	44	96,63	87,65
73.	Pengadilan Negeri Bojonegoro	79	82	99,57	89,6
74.	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	35	36	97,32	93,31
75.	Pengadilan Negeri Probolinggo	34	36	99,58	82,2
76.	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	30	30	96,45	90,08
77.	Pengadilan Negeri Sleman	36	59	99,08	88,05
78.	Pengadilan Negeri Gresik	151	153	95,96	89,18
79.	Pengadilan Negeri Magetan	43	50	96,71	91,68
80.	Pengadilan Negeri Batam	47	69	98,4	93,51
81.	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	152	143	97,45	91,39
82.	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	57	103	99,64	90,94
83.	Pengadilan Negeri Natuna/Ranai	31	31	99,28	80,71
84.	Pengadilan Negeri Bengkalis	55	55	98,50	89,86
85.	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	38	41	99,70	88,68

NO	PENGADILAN NEGERI	JUMLAH RESPONDEN SPAK	JUMLAH RESPONDEN SPKP	PENILAIAN MANDIRI	HASIL EVALUASI PT
86.	Pengadilan Negeri Rengat	35	37	99,61	85,91
87.	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	30	30	90,11	84,50
88.	Pengadilan Negeri Semarapura	30	30	95,27	84,03
89.	Pengadilan Negeri Singaraja	63	66	99,74	95,1
90.	Pengadilan Negeri Kotamobagu	78	77	99,82	92,25
91.	Pengadilan Negeri Airmadidi	153	147	97,28	92,16
92.	Pengadilan Negeri Amurang	133	117	97,76	90,41
93.	Pengadilan Negeri Tondano	97	99	95,71	88,39
94.	Pengadilan Negeri Manado	60	55	99,78	87,16
95.	Pengadilan Negeri Tahuna	82	82	95,30	82,77
96.	Pengadilan Negeri Mataram	52	53	92,67	88,28
97.	Pengadilan Negeri Paringin	31	31	98,06	97,98
98.	Pengadilan Negeri Rantau	58	56	99,2	97,69
99.	Pengadilan Negeri Banjarbaru	72	71	98,49	97,2
100.	Pengadilan Negeri Kandungan	208	108	96,88	96,74
101.	Pengadilan Negeri Marabahan	30	30	98,59	95,34
102.	Pengadilan Negeri Labuha	34	34	82,8	81,99
103.	Pengadilan Negeri Ternate	92	97	94,47	84,3
104.	Pengadilan Negeri Tobelo	96	99	93,63	81,73
105.	Pengadilan Negeri Sengkang	49	52	98,47	88,79
106.	Pengadilan Negeri Bulukumba	84	83	91,8	89,08
107.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	.30	35	96,76	92,87

**TAMBAHAN PENGADILAN NEGERI YANG DIUSULKAN PENGADILAN
TINGGI UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI**

NO	PENGADILAN NEGERI	JUMLAH RESPONDEN SPAK	JUMLAH RESPONDEN SPKP	PENILAIAN MANDIRI	HASIL EVALUASI
1.	Pematang Siantar	120	120	98,92	84,05
2.	Simalungun	40	38	99,67	87,44
3.	Karawang	32	33	99,82	90,28
4.	Kuningan	37	38	99,91	84,87
5.	Pulang Pisau	30	30	97,81	91,52
6.	Sei Rampah	56	55	99,07	88,64
7.	Manggala	30	34	96,8	91,46
8.	Batu Licin	37	34	98,56	91,46

Lampiran 3

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Nomor B/23/PW.00/2023

Tanggal 15 Maret 2023

Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM
Tahun 2023

Contoh Format Rekapitulasi penyampaian LHKAN Unit/Satuan Kerja

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di

Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK/WBBM) dan pengusulan (*nama unit/satuan kerja*) tahun 2023, dengan ini kami sampaikan rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DI (NAMA UNIT/SATUAN KERJA) TAHUN 2023

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

Demikian rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(pimpinan unit/satuan kerja)

(Nama)

Lampiran 4

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Nomor B/23/PW.00/2023
Tanggal 15 Maret 2023
Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM
Tahun 2023

Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kesesuaian dan Kebenaran Data dan Informasi yang Disampaikan dalam Evaluasi ZI

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
di
Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (*WBK/WBBM*) dan pengusulan (*unit/satuan kerja*) hasil evaluasi ZI TPI kepada TPN di tahun 2023, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (*nama jelas pejabat pimpinan unit/satuan kerja*)

Jabatan : (*pimpinan unit/satuan kerja*)

Alamat : (*alamat unit/satuan kerja*)

Menyatakan bahwa setiap data pendukung yang kami sampaikan terkait dengan:

1. Syarat pengusulan unit/satuan kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Data dukung dan informasi pengisian LKE baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kondisi yang berbeda maka kami bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal)
Pembuat Pernyataan,
(pimpinan unit/satuan kerja)

Materai Rp 10.000,-

(nama jelas pimpinan unit/satuan kerja)

Lampiran 5

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Nomor B/23/PW.00/2023

Tanggal 15 Maret 2023

Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM
Tahun 2023

**Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**

Instansi Pemerintah :

Unit Kerja :

No	Penilaian	Nilai*
I	Pengungkit (Pemenuhan + Reform) a. Manajemen Perubahan b. Penataan Tata Laksana c. Penguatan Manajemen SDM d. Peningkatan Akuntabilitas e. Penguatan Pengawasan f. Peningkatan Pelayanan Publik	XX,XX (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100)
II	Hasil a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Capaian Kinerja lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya b. Pelayanan Publik yang Prima 1. Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP)	XX,XX (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100)

* Nilai diambil dari sheet utama dalam LKE ZI Permenpan 90/2021

PENJELASAN SINGKAT PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK

1. Hasil Konkrit Pembangunan ZI
2. Keterkaitan Pembangunan ZI Dengan Isu Strategis Unit/Satuan Kerja
3. Inovasi Unggulan Dalam Penguatan Integritas, Kinerja, dan Layanan

Lampiran 7

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/23/PW.00/2023
Tanggal 15 Maret 2023
Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM
Tahun 2023

**Contoh Format
Matriks Risiko**

Instansi Pemerintah :
Unit Kerja :

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
1.			
2.			
dst.			